ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018

(Studi Kasus Pada Desa Ulak Kembahang Dua Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir)

Skripsi Oleh:

DEBY SUGIANTO

01031381520147

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018

(Studi Kasus Pada Desa Ulak Kembahang Dua Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir)

Disusun oleh:

Nama	: Deby Sugianto
NIM	: 01031381520147
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang kajian/konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian Komprehensif

Tanggal Persetujuan	Dosen Pembimbing
Tanggal : 25 November 2021	Ketua

Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

Tanggal : 25 November 2021	Anggota

Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak

NIP. 196905251996032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018

(Studi Kasus Pada Desa Ulak Kembahang Dua Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir)

Disusun oleh :

Nama	: Deby Sugianto
Nim	: 01031381520147
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/ Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 4 januari 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 2 Maret 2022

Ketua	Anggota	Anggota
Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak	Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak	Efva Octavina Donata G, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196503119920320 02	NIP. 196905251996032001	NIP. 198610262015042002

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI
14/03/2022

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deby Sugianto

NIM : 01031381520147

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018 (Studi Kasus Pada Desa Ulak Kembahang Dua Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir)

Pembimbing :

Ketua : Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak

Anggota : Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak

Tanggal Ujian : 4 Januari 2022

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 2 Maret 2022
Pembuat Pernyataan,

Deby Sugianto
NIM. 01031381520147

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu”

-Ali bin Abi Thalib-

Kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Orang Tuaku Tercinta
- Adik-Adikku Tersayang
- Seluruh Keluargaku
- Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018 (STUDI KASUS PADA DESA ULAK KEMBAHANG DUA KECAMATAN PEMULUTAN BARAT KABUPATEN OGAN ILIR)".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.

5. Ibu Eka Meirawati S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Ibu Efva Octavina Donata G, S.E., M.Si., Ak selaku dosen penguji yang telah memberikan keritik dan saran dalam penyusunan skripsi.
7. Ibu Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Ibu Okky Kurnia Ningsih, S.E selaku Administrasi Akademik Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
10. Kedua Orang Tua yang sagat saya kasihi, Bapak Wardoyo dan Ibu Elita yang telah selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya selama masa perkuliahan. Serta memberikan teladan kepada saya untuk selalu percaya dan berharap kepada Allah SWT.
11. Adik-Adikku tersayang Adella Riani, Adestri Muliani, dan Devana Issani yang selalu mendukung dan selalu siap membantu jika diminta pertolongan apapun
12. Seluruh Aparat Desa Ulak Kembahang Dua terkhususnya Bapak Hasbi Bustam selaku Kepala Desa dan Bapak Ari Harmawan S.Tr Kep. Selaku Kaur Keuangan yang telah bersedia memberikan informasi dan memberikan izin untuk menjadikan Desa Ulak Kembahang Dua menjadi objek dalam penelitian ini.

13. Seluruh teman-teman Akuntansi Bukit Angkatan 2015 yang telah memberikan banyak kenangan dan kesan yang tak akan saya lupakan.
14. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam penyusunan dan penyajian skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja. Penulis berharap semoga penelitian yang dilakukan dapat berguna bagi berbagai pihak.

Palembang, 2 Maret 2022
Penulis,

Deby Sugianto
01031381520147

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018
(Studi Kasus Pada Desa Ulak Kembahang Dua Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir)

Oleh :
Deby Sugianto

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian proses pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulak Kembahang Dua dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, Dokumentasi, Observasi dan Studi Kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulak Kembahang Dua mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kegiatan penatausahaan dan pelaporan sudah dipermudah dengan adanya Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).

Kata Kunci : Pengelolaan keuangan desa, Permendagri No. 20 tahun 2018

Ketua	Anggota
Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E. M.M., Ak	Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196503111992032002	NIP. 196905251996032001

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303711997031002

ABSTRACT

IMPLEMENTATION ANALYSIS OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT BASED ON PERMENDAGRI NO. 20 OF 2018
(Case Study in Ulak Kembahang Dua Village Pemulutan Barat District, Ogan Ilir Regency)

By :
Deby Sugianto

This study aims to determine the suitability of the village financial management process in Ulak Kembahang Dua Village with village financial management based on Permendagri No. 20 of 2018. This type of research is a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, documentation, observation, and literature study.

The results showed that the village financial management in Ulak Kembahang Dua Village, starting from planning, implementation, administration, reporting, and accountability, was by village financial management based on Permendagri No. 20 of 2018. Administration and reporting activities have been made easier with the Village Financial Information System / Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).

Keywords : Village Financial Management, Permendagri No. 20 Of 2018

Chairman	Member
Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E. M.M., Ak	Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196503119920320 02	NIP. 196905251996032001

Acknowledge by,
Head of Accounting Dapartement

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303719970310 02

SURAT PERNYATAAN ABSTRAKSI

Kami Dosen Pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa :

Nama : Deby Sugianto

NIM : 01031381520147

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Ulak Kembahang Dua Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir)

Telah kami periksa secara penulisan, grammar, maupun susunan tensesnya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 2 Maret 2022

Pembimbing Skripsi :

Ketua	Anggota
Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E. M.M., Ak	Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196503119920320 02	NIP. 196905251996032001

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303719970310 02

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa	: Deby Sugianto
NIM	: 01031381520147
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 7 Juli 1997
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah	: Jl Tanjung Sari 2 No. 48 Rt.32 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang
Email	: Debysugianto7@gmail.com

PENDIDIKAN

Tahun 2003-2009	: SDN 119 Palembang
Tahun 2009-2012	: SMP Pusri Palembang
Tahun 2012-2015	: SMA Pusri Palembang
Tahun 2015-2022	: Fakutas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF i

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ii

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR..... v

ABSTRAK..... viii

ABSTRACT ix

SURAT PERNYATAAN ABTRAKSI x

RIWAYAT HIDUP..... xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xvi

DAFTAR GAMBAR..... xv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian..... 8

1.5 Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

2.1 Landasan Teori 10

2.1.1 Desa..... 10

2.1.2 Akuntansi Desa..... 11

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... 12

2.1.4 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang 15

2.1.4.1 Pengertian Kuangan Desa..... 15

2.1.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa..... 15

A. Perencanaan 16

B. Pelaksanaan 18

C. Penatausahaan..... 23

D. Pelaporan..... 24

E. Pertanggungjawaban..... 25

2.2 Penelitian Terdahulu 26

2.3 Kerangka Berpikir 35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 38

3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian..... 38

3.2 Lokasi Penelitian 39

3.3 Teknik Pengumpulan Data..... 39

3.4 Teknik Analisis Data 40

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 42

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian..... 42

4.1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa 42

4.1.2 Wilayah Geografi Desa 46

4.1.3 Kependudukan dan Tenaga Kerja 46

4.1.4 Perekonomian Desa 47

4.1.5 Sarana dan Prasarana Desa 48

4.2 Program dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 49

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 54

4.3.1 Analisis Penerapan Perencanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 54

4.3.2 Analisis Penerapan Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 63

4.3.3 Analisis Penerapan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 73

4.3.4 Analisis Penerapan Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 79

4.3.5 Analisis Penerapan Petanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 88

5.1 Kesimpulan 88

5.2 Keterbatasan Penelitian 88

5.3 Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 91

Lampiran 94

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 29

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 47

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Bedasarkan Kriteria Tenaga Kerja 47

Tabel 4.3 Jumlah Sarana dan Prasarana..... 48

Tabel 4.4 Analisis Perbandingan Penerapan Perencanaan Keuangan Desa Ulak Kembahang Dua Dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018..... 59

Tabel 4.5 Analisis Perbandingan Penerapan Pelaksanaan Keuangan Desa Ulak Kembahang Dua Dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018..... 69

Tabel 4.6 Analisis Perbandingan Penerapan Penatausahaan Keuangan Desa Ulak Kembahang Dua Dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018..... 77

Tabel 4.7Analisis Perbandingan Penerapan Pelaporan Keuangan Desa Ulak Kembahang Dua Dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018..... 81

Tabel 4.8 Analisis Perbandingan Penerapan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ulak Kembahang Dua Dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018..... 84

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 37

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa 44

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Permusyawaratan Desa 45

Gambar 4.3 Laporan Realisasi APBDesa Ulak Kembahang Dua Tahun Anggaran 2020 53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, Desa memiliki hak otonomi yang memberikan wewenang dalam pengelolaan keuangan sendiri dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan dalam bagian sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dijalankan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.

Pelaksanaan atas otonomi desa didasari atas pertimbangan bahwa pemerintah desa lebih mengerti dan mampu memahami serta mengetahui kebutuhan masyarakat desa. Masalah yang perlu diperhatikan dalam otonomi desa yaitu pengelolaan atas keuangan desa secara optimal yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dikelola berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan pemberian wewenang tersebut diikuti juga dengan tuntutan pelaksanaan akuntabilitas di bidang akuntansi sektor publik agar tercapainnya *good governance* di pemerintahan desa. Tuntutan tersebut mengharuskan pemerintah desa memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan desa sehingga informasi yang didapatkan dapat dihandalkan. Menurut PP No. 71 Tahun 2010

bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi yang diberikan terbebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan matrial dan menyajikan fakta secara jujur dan serta dapat diverifikasi.

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018, Keuangan desa merupakan segala sesuatu pendanaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang. Dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pendekatan untuk merumuskan keuangan negara dengan melihat dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.

Dengan diberikan wewenang dalam penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan sendiri pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan secara professional, efektif, dan efisien serta akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang belaku. Dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan desa, pemerintah pusat memberikan dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimana kesiapan pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut masih dipertanyakan.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 72, Selain pendapatan Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN. Desa juga memiliki sumber pendapatan lain yang terdiri dari transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota, dan bantuan keuangan yang berasal dari APBD Povinsi/Kota, Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong.

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementrian Keuangan mengatakan pada APBN tahun anggaran 2020 Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa (DD) sebesar 72 trilliun Rupiah untuk 74.953 desa yang ada di Indonesia, yang berarti besaran jumlah rata-rata yang diterima desa atas Dana Desa sebesar 960,6 juta Rupiah. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang rata-rata diterima desa atas Dana Desa Sebesar 933,9 Juta Rupiah. (Sakti, 2021)

Dengan jumlah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat maupun pendapatan lain kepada pemerintah desa cukup besar, maka bukan tidak mungkin untuk terjadinya penyelewengan keuangan desa. Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaannya harus memenuhi akuntabilitas yaitu asas akuntabel, transparansi, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dalam pelaksanannya pemerintah desa wajib untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes.

Mengenai pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Memberikan pengertian pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah serangkaian kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan desa yang baik diharapkan dapat mencegah atau mengurangi kemungkinan penyimpangan atau penyelewangan atas keuangan desa sehingga dapat terwujudnya pembangunan desa.

Dalam penelitian-penelitan sebelumnya masih terdapat berbagai masalah dalam pengelolaan keuangan desa seperti penelitian yang dilakukan oleh Lumingkewas, Kalangi dan Gerungai (2021) pada desa Taraitak yang menunjukan adanya keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan dalam perencanaan Rancangan APBDes serta kurangnya pemahaman perangkat desa dengan aturan-aturan yang baru pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Masalah juga terdapat pada penelitian Ferarow dan Suprihanto (2018) menemukan permasalahan pada Desa Tlogoadi yang belum mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Beberapa kendala yang dihadapai yaitu belum efektifnya pembinaan terhadap aparat desa, kurangnya pengawasan, kurangnya personil serta kurangnya pemahaman atas peraturan yang berlaku.

Pada Penelitian Suwarno (2019) menemukan permasalahan terdapat kekurangan dalam pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada desa yang berada di wilayah Kecamatan Cilongok. Dikarenakan beberapa faktor yang menghambat yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem informasi yang belum memadai serta regulasi terkait pengelolaan keuangan desa yang belum lengkap.

Pada penelitian Astawa dan Budiasih (2019) menemukan permasalahan pengelolaan keuangan desa dari Desa Dauh Peken pada tahap perencanaan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang tidak sepenuhnya menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang seharusnya menjadi pedoman dalam menentukan program/kegiatan dalam

pembangunan desa. Dalam tahap pelaksanaan ditemukan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran belum disertai dengan dokumen dan bukti-bukti yang mendukung yang sah. Serta pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes ditemukan masih terdapat kesalahan dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan desa, dimana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak disetorkan sebagai pengeluaran pembiayaan.

Hutapea dan Aysa (2017) yang melakukan penelitian pengelolaan keuangan desa terhadap enam belas desa yang berada di wilayah Kecamatan Adiankoting. Pada penelitian tersebut ditemukan bawah pemerintah desa yang berada di wilayah Kecamatan Adiankoting belum sepenuhnya menjalankan prinsip partisipasi masyarakat dikarenakan masyarakat belum semuanya terlibat atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung serta masyarakat desa belum melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa. Serta, pemerintah desa pada wilayah Kecamatan Adiankoting belum terbuka dan transparan tentang keuangan desa yang digunakan.

Firmansyah (2018) yang melakukan penelitian penerapan pengelolaan keuangan desa pada Desa Rawa Burung menemukan permasalahan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa lebih didominasi oleh kepala desa bukan bendahara. Hal ini di dikarenakan kurangnya standar operasional prosedur untuk manajemen keuangan desa, deskripsi kerja yang tidak jelas dan kualifikasi kompetensi kerja serta kecilnya gaji yang diterima administrasi sehingga mengurangi motivasi aparat desa dalam bekerja.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada penelitian-penelitian yang terdahulu maka pentingnya meningkatkan penelitian yang terbaru mengenai pengelolaan keuangan desa apalagi seiring berjalannya waktu terdapat peraturan-peraturan terbaru yang membuat pengelolaan keuangan desa selalu berubah dan diharapkan semakin membaik sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat terlaksana dan menghasilkan laporan keuangan desa yang akuntabel.

Pada saat ini untuk aturan APBDes tahun 2020 menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa atas perubahan aturan sebelumnya yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pemberlakuaan atas Permendagri No. 20 Tahun 2018 terhitung mulai dari 1 Januari tahun 2019 dan perlunya disosialisasikan kepada aparat desa oleh Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa sehingga dapat terealisasi penerapannya kepada aparat desa.

Desa Ulak Kembahang Dua merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Perangkat desa pada Desa Ulak Kembahang Dua sangat terbuka dan bersedia untuk dijadikan objek penelitian, sehingga dalam penelitian ini Desa Ulak Kembahang Dua menjadi sampel penelitian yang tepat untuk melihat implementasi Permendagri No. 20 tahun 2018 dalam pengelolaan desa sudah sesuai atau belum. Mengingat keuangan desa merupakan amanah yang diberikan dan diterima melalui pajak serta perolehan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk pembangunan dan perkembangan masyarakat desa yang sejahtera dan merata.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul penelitian ini adalah **"Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Ulak Kembahang Dua Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diambil perumusan masalah pada tulisan ini sebagai berikut:

a. Bagaimana proses pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulak Kembahang Dua?

b. Bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulak Kembahang Dua dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

a. Mengetahui dan menggambarkan bagaimana proses pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulak Kembahang Dua.

b. Mengetahui kesesuaian proses pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulak Kembahang Dua dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

a. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan peneliti tentang pengelolaan keuangan pada Desa Ulak Kembahang Dua, serta dapat menambah pengetahuan mengenai teori dan praktik tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

b. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi ilmiah tentang kajian akuntansi keuangan desa mengingat perlunya meningkatkan pengetahuan tentang akuntansi di sektor pemerintahan. Serta dapat dijadikan refrensi selanjutnya kepada penelitian dengan tema yang sama.

c. Pemerintah Desa Ulak Kembahang Dua

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan masukan kepada Pemerintah Desa Ulak Kembahang Dua dalam proses pengelolaan keuangan desa pada Desa Ulak Kembahang Dua berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian skripsi ini tersusun dengan teratur dan terstruktur, maka dibuatlah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua dalam penelitian ini berisi teori-teori maupun konsep-konsep yang penting yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Bagian ini juga memuat penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan judul yang dibahas serta kerangka berpikir dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga dalam penelitian ini berisikan jenis, lokasi, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat dalam penelitian ini berisikan gambaran umum organisasi yang dijadikan objek penelitian serta memaparkan hasil dari analisis yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bagian ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab sebelumnya serta saran yang peneliti dapat berikan kepada objek yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Afriani, Sulisti dan Zahra Indah F. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes Di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara. Jurnal Akuntansi Unihaz: Jaz-Issn 2620-8555 – Vol.3 No.2. Desember 2020.

Astawa dan Budiasih. (2019). Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Dauh Peken. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis: ISSN 2303-1018 Vol. 14 No.2 Hal. 230-241.

Ferarow, Novi dan J. Suprihanto (2018) Implementasi Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman (evaluasi praktik Transparansi dan Akuntabilitas). Universitas Gajah Mada. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 1 No.2 Hal. 64-69 Oktober 2018.

Firmansyah, Amrie. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Rawa Burung Kabupaten Tanggerang Banten. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 2 No.2 September 2018.

Hamzah, Ardi. (2015). Tata Kelola Pemerintah Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris. Surabaya: Pustaka.

Hutapea, Herti Diana dan Aysa. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi pada Pemerintah Desa Adiankoting Kecamatan Adiankotiang Kabupaten Tapanuli Utara. Jurnal Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi: ISSN: 2301-797X Vol. 6 No. 1 Mei 2017.

Lumingkewas, Kalangi, dan Gerungai. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). Junal EMBA: ISSN 2303-1174 Vol.9 No.1.

Malumperas, Manossoh, dan Pangerapan. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana desa (Studi di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulewesi Utara. Jurnal Emba Vol. 9 No.1 Januari 2021 Hal 266-272.

Mersa dan Suriadi. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda Vol. 16 No. 2 Oktober 2020.

Mumuaya, Sabijono dan Gamaliel. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Emba: ISSN 2303-1174 Vol.5 No.2 Juni 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Sakti, Nufransa Wira. (2021). Kementerian Keuangan Sudah Mulai Salurkan Dana Desa Tahap I. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-kementerian-keuangan-sudah-mulai-salurkan-dana-desa-tahap-

i/#:~:text=Alokasi%20Dana%20Desa%20Tahun%20Anggaran,2019%20sebesar%20Rp933%2C9%20juta.

Sujarweni, V.Wiratna. (2015). Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Supomo, Bambang, dan Nur Indriantoro. (2002). Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Kedua. Yogyakarta; Penerbit BFEE UGM.

Suwarno. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. Jurnal Riset dan Perpajakan Vol.6 No.1 Juni 2019 Hal 25-37.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.